



**UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/ 2024**  
**STUDI HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA**

---

Nama : Jackson Lawrence  
NIM : 00000070612  
Mata Kuliah : Indonesian Language  
Kode Mata Kuliah : UM 142 - O

1. Buatlah judul dan ragangan pendahuluan berdasarkan penelitian kelompok Anda!

**ANALISIS PEMANFAATAN TWITTER (X) DALAM UPAYA  
KESADARAN BAHAYA KORUPSI YANG BERDAMPAK KEMISKINAN  
PADA MASYARAKAT**

**1. Pendahuluan**

**1.1. Latar Belakang**

- 1) Konteks tentang tingginya tingkat korupsi yang berkaitan dengan kemiskinan di masyarakat.
- 2) Peran Twitter dalam komunikasi publik yang dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi.
- 3) Keterlibatan masyarakat melalui Twitter sebagai metode penanggulangan tindakan korupsi.

**1.2. Landasan Teori**

- 1) **Teori Komunikasi Sosial:** Teori komunikasi sosial dapat digunakan untuk memahami bagaimana pesan-pesan mengenai korupsi dan kemiskinan disampaikan, diterima, dan diproses oleh masyarakat melalui Twitter. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana media sosial mempengaruhi komunikasi dan persepsi.

- 2) **Teori Kesadaran Sosial:** Konsep kesadaran sosial berkaitan erat dengan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu sosial, termasuk korupsi dan kemiskinan. Landasan teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana Twitter dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran sosial mengenai isu-isu ini.
- 3) **Teori Perubahan Sosial:** Perubahan sosial adalah tujuan utama dalam upaya memerangi korupsi dan kemiskinan. Teori perubahan sosial dapat membantu dalam memahami bagaimana penggunaan Twitter dapat menjadi alat untuk memicu perubahan sosial yang positif.
- 4) **Teori Partisipasi Masyarakat:** Mempertimbangkan cara Twitter memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai isu sosial. Teori partisipasi masyarakat dapat membantu menjelaskan bagaimana Twitter dapat digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya antikorupsi dan anti-kemiskinan.
- 5) **Teori Media Sosial dan Opini Publik:** Media sosial, termasuk Twitter, memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik. Landasan teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana pesan-pesan yang berfokus pada korupsi dan kemiskinan dapat mempengaruhi opini publik dan menggerakkan tindakan.
- 6) **Teori Pengaruh Sosial:** Teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana pengaruh sosial, termasuk *influencer* dan tokoh masyarakat di Twitter, dapat membantu dalam menyebarkan pesan-pesan tentang bahaya korupsi dan dampaknya pada kemiskinan.

### 1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Memberikan pengetahuan mengenai definisi korupsi secara menyeluruh beserta dengan bentuk dan jenis korupsi berdasarkan skala dan paparnya.

- 2) Menerangkan apa saja bahaya dari korupsi yang dapat mengakibatkan kemiskinan seseorang beserta penanggulangannya.
- 3) Menjelaskan hubungan antar korupsi, kemiskinan, dan perekonomian individu ataupun kelompok.
- 4) Menganalisis peran Twitter dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi yang berdampak pada kemiskinan.
- 5) Menilai dampak aktivitas dan kampanye atau komunitas antikorupsi yang dilakukan di Twitter terhadap partisipasi masyarakat dalam upaya memerangi korupsi dan kemiskinan.
- 6) Mengevaluasi dampak yang terukur dari penggunaan Twitter dalam konteks ini dan mencari bukti bahwa kesadaran masyarakat melalui platform ini dapat menghasilkan perubahan konkret dalam upaya antikorupsi dan pengurangan kemiskinan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

- 1) **Kontribusi Terhadap Pengetahuan Akademik:** Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan ke dalam peran media sosial, khususnya Twitter, dalam meningkatkan kesadaran tentang korupsi dan kemiskinan. Hal ini dapat menjadi kontribusi berharga bagi literatur akademik di bidang komunikasi sosial dan sosiologi.
- 2) **Pemahaman Lebih Mendalam tentang Isu Sosial:** Studi ini dapat membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara korupsi dan kemiskinan, serta cara media sosial dapat digunakan untuk memperjuangkan perubahan sosial positif. Ini bisa menjadi sumber daya bagi para peneliti, aktivis, dan pengambil keputusan yang berupaya memerangi korupsi dan kemiskinan.
- 3) **Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Dengan menganalisis strategi yang efektif, penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi cara-cara terbaik untuk menggunakan Twitter sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

bahaya korupsi. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan kesadaran yang lebih luas di masyarakat.

- 4) **Kontribusi terhadap Kebijakan Publik:** Hasil penelitian ini dapat membantu pengambil keputusan di tingkat pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam memerangi korupsi dan kemiskinan. Mereka dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai dasar untuk mengembangkan strategi dan kampanye yang lebih efektif.
- 5) **Pemberdayaan Masyarakat:** Penelitian ini dapat memberikan pedoman kepada kelompok aktivis dan advokasi yang ingin menggunakan Twitter sebagai alat untuk menggerakkan masyarakat dalam memerangi korupsi dan kemiskinan. Ini dapat berdampak positif pada pemberdayaan masyarakat dalam upaya-upaya perubahan sosial.
- 6) **Peningkatan Akuntabilitas:** Dengan memberikan bukti konkret tentang efektivitas kampanye di media sosial, penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam hal penanganan korupsi dan masalah kemiskinan.

2. Buatlah sampul dan pendahuluan artikel ilmiah kelompok Anda!

## **ANALISIS PEMANFAATAN TWITTER (X) DALAM UPAYA KESADARAN BAHAYA KORUPSI YANG BERDAMPAK KEMISKINAN PADA MASYARAKAT**

**Hans Philemon Limanza<sup>1</sup>, Jackson Lawrence<sup>2</sup>, Louis Gabriel Hernandez<sup>3</sup>, Rich Marvin Lim<sup>4</sup>, Russel Shivah Budiarto<sup>5</sup>, Ni Wayan Ayu Permata Sari<sup>6</sup>.**

**<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup> Informatika, Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Indonesia, 15810**

**<sup>6</sup> Film, Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Indonesia, 15810**

### **Abstract**

....

Kata kunci: korupsi, kemiskinan

### **Pendahuluan**

Tindakan korupsi adalah salah satu aspek yang merugikan bagi berbagai pihak karena menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat, bahkan korupsi telah menarik perhatian seluruh dunia karena masyarakat internasional mengakui bahwa korupsi telah merajalela hingga bersifat transnasional. Berdasarkan data dari tahun 2013-2016 milik litbang KPK mengenai kerugian negara akibat korupsi, hanya 35% yang berhasil didapatkan kembali dari total kerugian sebesar Rp4.853.615.205.003. (Mahmud, 2020, hlm. 257). Ketidakmampuan untuk mengembalikan dana tersebut dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menjaga tingkat kemiskinan yang selalu tinggi. Selain itu, ketergangguan perekonomian akibat tindakan korupsi membuat korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja dan terus membahayakan masyarakat, baik masyarakat miskin, menengah, maupun kaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan dengan pemanfaatan teknologi-teknologi yang ada oleh masyarakat sekitar sebagai awal dari pengenalan bahaya korupsi.

Korupsi atau yang sering dikenal dengan rasuah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak pejabat, pejabat politisi, pegawai negeri, ataupun pihak lain yang berkujut secara ilegal dan tidak wajar dengan cara menyalahgunakan kepercayaan publik untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan besar (Aisyah, 2018, hlm. 9). Dengan kata lain, korupsi adalah tindakan yang dianggap sebagai bentuk kejahatan yang dapat disebabkan oleh kemiskinan melalui ketimpangan perekonomian yang didapati, yang mana jika kemiskinan meningkat menyebabkan ketimpangan perekonomian juga semakin tinggi beserta dengan korupsinya juga meningkat (Putri & Aimon, 2022, hlm. 16). Pernyataan ini juga didukung oleh Aifa & Siregar (2019, hlm. 468) yang menyatakan bahwa korupsi adalah suatu kondisi yang dapat mengganggu kestabilan perekonomian dan menimbulkan jebakan kemiskinan akibat jumlah ketersediaan fasilitas publik yang sedikit ataupun tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sosial, ekonomi, dan politik yang menghambat pendistribusian sumber daya secara efisien.

Pada kenyataannya, korupsi telah menyusup ke lembaga-lembaga atau pihak-pihak sosial, ekonomi, dan politik di seluruh negara yang tentunya mempengaruhi ketidakstabilan perekonomian negara tersebut. Baktiar, dkk. (2020, hlm. 312) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara korupsi dengan kemiskinan, dimana korupsi akan mempengaruhi faktor perekonomian suatu tempat yang kemudian berdampak kepada tingkat kemiskinan. Ichvani & Sasana (2019, hlm. 70) juga mengatakan bahwa hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi sangat kuat. Dengan kata lain, semakin rendah suatu tingkat korupsi di satu negara, semakin cepat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Oleh karena itu, praktik korupsi menyebabkan kerugian finansial, menghambat penyediaan layanan publik dan kemajuan dalam bidang sosial dan ekonomi di negara-negara berkembang seperti negara Indonesia.

Secara umum, berbagai bentuk korupsi bertujuan untuk mengambil keuntungan demi diri sendiri atau instansi pribadi, yang secara tidak langsung dapat menyebabkan kemiskinan, terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, menghambat kemajuan ekonomi, dan lain sebagainya berdasarkan lansiran dari [aclc.kpk.go.id](http://aclc.kpk.go.id). Bentuk korupsi yang dimaksud terbagi atas beberapa macam yaitu

berupa kerugian atas keuangan negara, tindakan suap-menyuap, tindakan penggelapan dalam jabatan untuk meraih posisi tertinggi, pemerasan, perbuatan curang dalam segala hal demi mencapai tujuan yang diinginkan, dan benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi (Harahap, dkk., 2023, hlm. 57). Selain itu, berdasarkan skala dan paparannya, KPK membagi korupsi menjadi 3 jenis yaitu *petty corruption* (Korupsi berskala kecil oleh pejabat yang berinteraksi dengan masyarakat), *grand corruption* (Korupsi berskala kelas kakap dengan nilai kerugian negara miliaran hingga triliunan rupiah), dan *political corruption* (Korupsi ketika keputusan politik menyalahgunakan wewenangnya dengan cara memanipulasi). Kesimpulannya, ketiga jenis korupsi tersebut, baik berskala kecil maupun sedang hingga besar, dilakukan melalui suap, gratifikasi, nepotisme, dan lain-lain untuk memanfaatkan dana negara yang dapat menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat terutama negara seperti negara Indonesia yang tingkat korupsinya tinggi.

Di Indonesia, korupsi sudah merajalela bahkan dianggap sebagai “budaya” meskipun pihak pemerintah telah mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat dengan KPK, yang memiliki tujuan untuk memberantas tindakan korupsi apapun yang terjadi di Indonesia. Alasan mengapa seseorang dapat melakukan korupsi adalah karena sifat rakusnya, gaya hidup konsumtifnya, kurangnya moralitas untuk menahan keinginan mereka untuk korup, dan kurangnya etika sebagai pejabat (Syarief & Prastiyo, 2018, hlm. 8-9). Beberapa pihak lain juga berargumentasi bahwa faktor-faktor individual seperti kemiskinan atau penghasilan rendah dapat mendorong perilaku korupsi. Selain itu, kekurangan edukasi atau pemahaman terhadap bahaya korupsi membuat sumber daya manusia di Indonesia semakin menurun. Oleh sebab itu, permasalahan tersebut memerlukan suatu metode yang dapat meminimalisir dampak permasalahan tersebut. Metode yang dimaksud dapat digunakan oleh pemerintah maupun masyarakat setempat, yaitu dengan menyalurkan informasi berupa edukasi mengenai nilai-nilai yang mengandung unsur antikorupsi melalui jalur pendidikan dan teknologi. Pemberian edukasi tersebut perlu ditanamkan mulai dari peserta anak didik supaya generasi muda penerus bangsa ini tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi (Setyawan, dkk., 2022, hlm. 146).

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa program antikorupsi yang diimplementasikan bagi penerus bangsa juga diterapkan kepada masyarakat-masyarakat yang belum pernah menerima pendidikan tersebut, seperti masyarakat miskin yang susah untuk mendapatkan ilmu.

Jika program antikorupsi tidak dikaitkan dengan intervensi kebutuhan dasar alternatif dalam bentuk edukasi, hal tersebut akan berdampak negatif pada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dalam strategi ini, penyertaan modal sosial, politik dan budaya ke dalam analisis kemiskinan sangatlah krusial. Strategi-strategi ini harus melihat lebih dekat faktor-faktor yang membatasi peluang akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Kesimpulannya, program antikorupsi akan memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menghambat pengembangan masyarakat, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan dasar mereka yang membutuhkan bantuan.

Negin, dkk. (2010, hlm. 8) mengatakan bahwa ada tiga jenis program antikorupsi yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat miskin sebagai strategi penanggulangan kasus korupsi, yakni inklusivitas, legitimasi, dan akuntabilitas. Inklusivitas diarahkan untuk mengatasi eksklusi sosial yang membatasi partisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, dan sosial. Dengan memberdayakan masyarakat yang historisnya kurang beruntung, inklusivitas mendorong pemberdayaan dan desentralisasi. Keabsahan (legitimasi) berfokus pada isu-isu seperti keadilan, penyelesaian perselisihan, kekerasan sosial, dan hak asasi manusia. Unsur tersebut sangat relevan terhadap masyarakat miskin. Selain itu, adanya ancaman pelecehan dan intimidasi dari otoritas publik membuat akuntabilitas menjadi kunci. Dengan meminta pertanggungjawaban pemerintah dan memberikan sanksi, masyarakat miskin dapat dilibatkan sebagai pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi, bukan sekadar korban. Akuntabilitas berarti meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan mereka dan kemungkinan memberikan sanksi kepada mereka. Dengan meningkatkan akuntabilitas politik, masyarakat miskin dianggap sebagai pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi, dan bukan sebagai korban. Penjabaran ketiga program antikorupsi tersebut dapat juga dilakukan dengan mengajak masyarakat



untuk mengedukasi sesama dengan bantuan implementasi teknologi berupa bantuan platform sosial media.

Di dunia digital yang berkembang pesat ini, platform media sosial seperti Twitter (X) adalah saluran yang tepat untuk mengatasi masalah korupsi dan kemiskinan. Menurut data yang dipaparkan oleh *We Are Social* dalam laporan Digital 2023: Indonesia, 60% pengguna internet yang terdapat di Indonesia menggunakan media sosial Twitter(X), sehingga memungkinkan partisipasi dalam percakapan terbuka dan berbagi informasi di seluruh dunia. Selain itu, ide-ide konstruktif pribadi yang diungkapkan di media sosial, khususnya dari selebriti atau artis terkenal, berpotensi mengubah opini publik mengenai korupsi dengan cepat. Oleh karena itu, Twitter (X) diharapkan dapat menjadi sarana strategis untuk menyalurkan informasi mengenai bahaya korupsi terhadap tingkat kemiskinan kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesadaran mereka dan mendorong keterlibatan dalam kegiatan antikorupsi, serta mengurangi korupsi melalui pemberian informasi yang berkaitan dan kampanye atau komunitas antikorupsi digital di platform media sosial Twitter (X).

3. Tulislah daftar pustaka artikel ilmiah kelompok Anda!

- Abram, M., & Yeniwati, Y. (2021). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, korupsi dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 3(3), 32. <https://doi.org/10.24036/jkep.v3i3.12367>
- Aifa, R., & Siregar, M. I. (2019). Korupsi dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 4(4), 464–473. <https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/14963>
- Aisyah. (2018, July 1). Pengaruh pendidikan antikorupsi terhadap sikap tanggungjawab dan kemampuan berpikir kritis di kelas V SD Negeri 02 Pliken. Repository Universitas Muhammadiyah Purwokerto. <https://repository.ump.ac.id/8025/>
- Baktiar, A. F., Fadhilah, H., Simatupang, M. D., Warman, M., Vira, S., & Nooraeni, R. (2020). Pengaruh tindak korupsi terhadap kemiskinan di negara-negara Asia Tenggara dengan model panel data. *Indonesian Journal of Statistics and Its Applications*, 4(2), 311–320. <https://doi.org/10.29244/ijisa.v4i2.634>
- Harahap, N. D., Sitompul, S., Firmansyah, E., Siregar, A., & Wulandari, A. (2023). Pentingnya pendidikan anti korupsi dimulai sejak dini. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1), 57. <https://www.marsipature.makarioz.org/index.php/marsipature/article/view/38>
- Ichvani, L. F., & Sasana, H. (2019). Pengaruh korupsi, konsumsi, pengeluaran pemerintah dan keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN 5. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 70. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1342>
- Junaidi, & Patra, K. (2018). Korupsi, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1). <http://digilib.stiem.ac.id:8080/jspui/bitstream/123456789/845/1/Korupsi%20pertumbuhan%20ekonomi.pdf>

- Mahmud, A. (2020). Urgensi penegakan hukum progresif untuk mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 256–271. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.256-271>
- Negin, V., Zakariah Abd Rashid, Nikopour, H., B, Z., & Rashid, A. (2010). The causal relationship between corruption and poverty: A panel data analysis. Munich Personal RePEc Archive. <https://mpa.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/24871>
- Putri, R., D., & Aimon, H. (2022). Analisis pertumbuhan ekonomi pengguna internet, kemiskinan dan korupsi di negara ASEAN: Lower middle income. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 4(2), 16. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/article/view/13317/5143>
- Setyawan, A., Arief, R. F., Alex, A., Maitri, B., Chou, C., Hartono, C., Jennifer, F., & Surya, P. (2022). Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya integritas dan sikap anti korupsi di SMA Mondial Batam untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi. *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 4(1), 146. <https://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro/article/view/6934>
- Syarief, R. A. O., & Prastiyo, D. (2018). Korupsi kolektif (korupsi berjamaah) di Indonesia: Antara faktor penyebab dan penegakan hukum. *Jurnal Hukum Respublica*, 18(1), 8–9. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/3947/2102>
- We Are Social (2023, February 9). *Digital 2023: Indonesia*. DataReportal – Global Digital Insights. [https://indd.adobe.com/embed/3f33174b-35c2-465a-94da-07e39f5687a0?s\\_tartpage=1](https://indd.adobe.com/embed/3f33174b-35c2-465a-94da-07e39f5687a0?s_tartpage=1)

# UM142-O UTS Kel 1

*by* Ignatius Steven

---

**Submission date:** 23-Oct-2023 03:56AM (UTC-0700)

**Submission ID:** 2204570253

**File name:** turnitin\_UTS\_Bindo.docx (23.92K)

**Word count:** 1133

**Character count:** 7992

## **Pendahuluan**

Tindakan korupsi adalah salah satu aspek yang merugikan bagi berbagai pihak karena menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat, bahkan korupsi telah menarik perhatian seluruh dunia karena masyarakat internasional mengakui bahwa korupsi telah merajalela hingga bersifat transnasional. Berdasarkan data dari tahun 2013-2016 milik litbang KPK mengenai kerugian negara akibat korupsi, hanya 35% yang berhasil didapatkan kembali dari total kerugian sebesar Rp4.853.615.205.003. (Mahmud, 2020, hlm. 257). Ketidakmampuan untuk mengembalikan dana tersebut dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menjaga tingkat kemiskinan yang selalu tinggi. Selain itu, ketergangguan perekonomian akibat tindakan korupsi membuat korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja dan terus membahayakan masyarakat, baik masyarakat miskin, menengah, maupun kaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan dengan pemanfaatan teknologi-teknologi yang ada oleh masyarakat sekitar sebagai awal dari pengenalan bahaya korupsi.

Korupsi atau yang sering dikenal dengan rasuah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak pejabat, pejabat politisi, pegawai negeri, ataupun pihak lain yang berkuot secara ilegal dan tidak wajar dengan cara menyalahgunakan kepercayaan publik untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan besar (Aisyah, 2018, hlm. 9). Dengan kata lain, korupsi adalah tindakan yang dianggap sebagai bentuk kejahatan yang dapat disebabkan oleh kemiskinan melalui ketimpangan perekonomian yang didapati, yang mana jika kemiskinan meningkat menyebabkan ketimpangan perekonomian juga semakin tinggi beserta dengan korupsinya juga meningkat (Putri & Aimon, 2022, hlm. 16). Pernyataan ini juga didukung oleh Aifa & Siregar (2019, hlm. 468) yang menyatakan bahwa korupsi adalah suatu kondisi yang dapat mengganggu kestabilan perekonomian dan menimbulkan jebakan kemiskinan akibat jumlah ketersediaan fasilitas publik yang sedikit ataupun tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sosial, ekonomi, dan politik yang menghambat pendistribusian sumber daya secara efisien.

Pada kenyataannya, korupsi telah menyusup ke lembaga-lembaga atau pihak-pihak sosial, ekonomi, dan politik di seluruh negara yang tentunya mempengaruhi ketidakstabilan perekonomian negara tersebut. Baktiar, dkk. (2020, hlm. 312) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara korupsi dengan kemiskinan, dimana korupsi akan mempengaruhi faktor perekonomian suatu tempat yang kemudian berdampak kepada tingkat kemiskinan. Ichvani & Sasana (2019, hlm. 70) juga mengatakan bahwa hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi sangat kuat. Dengan kata lain, semakin rendah suatu tingkat korupsi di satu negara, semakin cepat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Oleh karena itu, praktik korupsi menyebabkan kerugian finansial, menghambat penyediaan layanan publik dan kemajuan dalam bidang sosial dan ekonomi di negara-negara berkembang seperti negara Indonesia.

Secara umum, berbagai bentuk korupsi bertujuan untuk mengambil keuntungan demi diri sendiri atau instansi pribadi, yang secara tidak langsung dapat menyebabkan kemiskinan, terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, menghambat kemajuan ekonomi, dan lain sebagainya berdasarkan lansiran dari [aclc.kpk.go.id](http://aclc.kpk.go.id). Bentuk korupsi yang dimaksud terbagi atas beberapa macam yaitu berupa kerugian atas keuangan negara, tindakan suap-menyuap, tindakan penggelapan dalam jabatan untuk meraih posisi tertinggi, pemerasan, perbuatan

curang dalam segala hal demi mencapai tujuan yang diinginkan, dan benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi (Harahap, dkk., 2023, hlm. 57). Selain itu, berdasarkan skala dan paparannya, KPK membagi korupsi menjadi 3 jenis yaitu *petty corruption* (Korupsi berskala kecil oleh pejabat yang berinteraksi dengan masyarakat), *grand corruption* (Korupsi berskala kelas kakap dengan nilai kerugian negara miliaran hingga triliunan rupiah), dan *political corruption* (Korupsi ketika keputusan politik menyalahgunakan wewenangnya dengan cara memanipulasi). Kesimpulannya, ketiga jenis korupsi tersebut, baik berskala kecil maupun sedang hingga besar, dilakukan melalui suap, gratifikasi, nepotisme, dan lain-lain untuk memanfaatkan dana negara yang dapat menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat terutama negara seperti negara Indonesia yang tingkat korupsinya tinggi.

Di Indonesia, korupsi sudah merajalela bahkan dianggap sebagai “budaya” meskipun pihak pemerintah telah mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat dengan KPK, yang memiliki tujuan untuk memberantas tindakan korupsi apapun yang terjadi di Indonesia. Alasan mengapa seseorang dapat melakukan korupsi adalah karena sifat rakusnya, gaya hidup konsumtifnya, kurangnya moralitas untuk menahan keinginan mereka untuk korup, dan kurangnya etika sebagai pejabat (Syarief & Prastiyo, 2018, hlm. 8-9). Beberapa pihak lain juga berargumentasi bahwa faktor-faktor individual seperti kemiskinan atau penghasilan rendah dapat mendorong perilaku korupsi. Selain itu, kekurangan edukasi atau pemahaman terhadap bahaya korupsi membuat sumber daya manusia di Indonesia semakin menurun. Oleh sebab itu, permasalahan tersebut memerlukan suatu metode yang dapat meminimalisir dampak permasalahan tersebut. Metode yang dimaksud dapat digunakan oleh pemerintah maupun masyarakat setempat, yaitu dengan menyalurkan informasi berupa edukasi mengenai nilai-nilai yang mengandung unsur antikorupsi melalui jalur pendidikan dan teknologi. Pemberian edukasi tersebut perlu ditanamkan mulai dari peserta anak didik supaya generasi muda penerus bangsa ini tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi (Setyawan, dkk., 2022, hlm. 146). Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa program antikorupsi yang diimplementasikan bagi penerus bangsa juga diterapkan kepada masyarakat-masyarakat yang belum pernah menerima pendidikan tersebut, seperti masyarakat miskin yang susah untuk mendapatkan ilmu.

Jika program antikorupsi tidak dikaitkan dengan intervensi kebutuhan dasar alternatif dalam bentuk edukasi, hal tersebut akan berdampak negatif pada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dalam strategi ini, penyertaan modal sosial, politik dan budaya ke dalam analisis kemiskinan sangatlah krusial. Strategi-strategi ini harus melihat lebih dekat faktor-faktor yang membatasi peluang akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Kesimpulannya, program antikorupsi akan memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menghambat pengembangan masyarakat, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan dasar mereka yang membutuhkan bantuan.

Negin, dkk. (2010, hlm. 8) mengatakan bahwa ada tiga jenis program antikorupsi yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat miskin sebagai strategi penanggulangan kasus korupsi, yakni inklusivitas, legitimasi, dan akuntabilitas. Inklusivitas diarahkan untuk mengatasi eksklusi sosial yang membatasi partisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, dan sosial. Dengan

memberdayakan masyarakat yang historisnya kurang beruntung, inklusivitas mendorong pemberdayaan dan desentralisasi. Keabsahan (legitimasi) berfokus pada isu-isu seperti keadilan, penyelesaian perselisihan, kekerasan sosial, dan hak asasi manusia. Unsur tersebut sangat relevan terhadap masyarakat miskin. Selain itu, adanya ancaman pelecehan dan intimidasi dari otoritas publik membuat akuntabilitas menjadi kunci. Dengan meminta pertanggungjawaban pemerintah dan memberikan sanksi, masyarakat miskin dapat dilibatkan sebagai pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi, bukan sekadar korban. Akuntabilitas berarti meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan mereka dan kemungkinan memberikan sanksi kepada mereka. Dengan meningkatkan akuntabilitas politik, masyarakat miskin dianggap sebagai pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi, dan bukan sebagai korban. Penjabaran ketiga program antikorupsi tersebut dapat juga dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk mengedukasi sesama dengan bantuan implementasi teknologi berupa bantuan platform sosial media.

Di dunia digital yang berkembang pesat ini, platform media sosial seperti Twitter (X) adalah saluran yang tepat untuk mengatasi masalah korupsi dan kemiskinan. Menurut data yang dipaparkan oleh *We Are Social* dalam laporan Digital 2023: Indonesia, 60% pengguna internet yang terdapat di Indonesia menggunakan media sosial Twitter(X), sehingga memungkinkan partisipasi dalam percakapan terbuka dan berbagi informasi di seluruh dunia. Selain itu, ide-ide konstruktif pribadi yang diungkapkan di media sosial, khususnya dari selebriti atau artis terkenal, berpotensi mengubah opini publik mengenai korupsi dengan cepat. Oleh karena itu, Twitter (X) diharapkan dapat menjadi sarana strategis untuk menyalurkan informasi mengenai bahaya korupsi terhadap tingkat kemiskinan kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesadaran mereka dan mendorong keterlibatan dalam kegiatan antikorupsi, serta mengurangi korupsi melalui pemberian informasi yang berkaitan dan kampanye atau komunitas antikorupsi digital di platform media sosial Twitter (X).

# UM142-O UTS Kel 1

---

## ORIGINALITY REPORT

---

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

Exclude quotes      On

Exclude bibliography      On

Exclude matches      < 5 words



# UM142-O UTS Kel 1

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---